

ABSTRAK

TIMOTIUS ERIC HARYANTO, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Akibat Hukum Dan Peranan Notaris Terhadap Akta Pendirian Yayasan Pra Dan Pasca Berlakunya Undang - Undang Yayasan, (Studi Kasus Akta Pendirian Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen No 17 Tahun 1991 Dan Akta Pendirian Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen No 2 Tahun 2011), Komisi Pembimbing Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. dan anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro S.H., M.H.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Studi kasus dalam penulisan ini adalah Yayasan Penyelenggara Pelayanan Perguruan Kristen (“YPPPK”) yang mana terdapat dua akta pendirian yayasan yang didirikan yaitu pada tahun 1991 dan pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum akta pendirian yayasan pra dan pasca adanya undang - undang yayasan dan peranan notaris pra dan pasca berlakunya undang - undang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK tahun 1991 dan 2011. Penulis dalam menganalisis penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan undang-undangan, jenis penelitian normatif, bersifat preskriptif, serta teknik analisis hukum induktif. Penulis menggunakan sumber data sekunder yang diolah dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

Akibat hukum akta pendirian yayasan pra berlakunya undang-undang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 1991 adalah tidak ada, karena akta pendirian YPPPK 1991 telah memenuhi unsur – unsur prosedur pendirian badan hukum saat itu, sedangkan akibat hukum akta pendirian yayasan pasca berlakunya undang undang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 2011 juga tidak ada, karena belum ada keputusan hakim yang inkracht dan mengikat mengenai kejelasan status hukum YPPPK 1991 yang telah melanggar undang-undang yayasan. Peranan notaris pra berlakunya undang-undang yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 1991, yaitu notaris RD sudah tepat dalam menerapkan peranan notaris karena Notaris RD sudah menerapkan pasal – pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris secara benar untuk mendirikan YPPPK 1991, sedangkan Peranan notaris pasca berlakunya undang-undang Yayasan terhadap Akta Pendirian YPPPK 2011, yaitu Notaris TT telah salah dalam menerapkan peranan notaris yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Yayasan, karena Notaris TT telah membuat Akta Pendirian Yayasan baru, dimana seharusnya Notaris TT membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat yang berisi tentang rapat pleno yang dihadiri lengkap oleh pengurus Yayasan YPPPK 1991 dan 2011 yang masih aktif, untuk membentuk data Yayasan yang merupakan gabungan dari YPPPK 1991 dan 2011.

Kata kunci: yayasan, akta pendirian, peranan notaris.

ABSTRACT

TIMOTIUS ERIC HARYANTO, Master of Notary Program, Jendral Soedirman University, Faculty of Law. Legal Consequences and the Role of Public Notary on the Deed of Establishment of a Foundation Before and After the enforcement of Law on Foundation, (Case Study of the Deed of Establishment of “YPPPK No. 17 year 1991 and the Deed of Establishment of “YPPPK No.2 year 2011), Advisory Commission. Chairperson Prof. Tri Lisiani Prihatinah, SH, M.A., Ph.D. and members of Dr. Rahadi Wasi Bintoro S.H. MH.

Foundation is a legal entity consisting of assets that are separated and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields. The case study in this legal research is YPPPK in which there are two deeds of establishment, namely in 1991 and in 2011. The purpose of this legal research is to analyze the legal consequences of the deed of establishment and the role of public notary before and after the enactment of the foundation law on the 1991 and 2011 Deeds of Establishment of YPPPK. In analyzing this legal research, the author uses a statutory approach, normative legal research, prescriptive, and inductive legal analysis. The author uses secondary data resources that are processed and presented in narrative text.

YPPPK Deed of Establishment in 2011 has fulfilled requirements and elements of establishment of the foundation regulated in Law of Foundation, however, the legal uncertainty of YPPPK 1911 could affect the legal status of YPPPK 2011 if there is judge decision that is final and binding. Notary TT is not accurate in applying articles provided in the Government Regulation regarding Foundation since Notary TT made a new Deed of Establishment instead of Deed of Meeting Resolution which contains a plenary meeting which was attended in full by the management of the 1991 and 2011 YPPPK Foundations who are still active, to form Foundation data which is a combination of the 1991 and 2011 YPPPK.

Keywords: *foundation, deed of establishment, role of public notary.*